

**PENGARUH KRISIS EKONOMI 2008 DAN FAKTOR FUNDAMENTAL
TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**INFLUENCE OF 2008 ECONOMIC CRISIS AND FUNDAMENTAL FACTOR OF
FUNDING ISLAMIC BANK IN INDONESIA**

Ali Muhayatsyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

muhayatsyah@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

In conducting Islamic bank intermediation, internal and external indicator is needed in financial activities. In this research, the indicators that taken into consideration by Islamic bank in the public financial is the economic condition as an external factor. In this particular case the researcher observed the period of the economic crisis of 2008 as the subject year. The second indicator is the basic factor in the form of financial performance which is a controlling factor on the performance of Islamic bank financing.

The result of this research explained that the external and internal factors in the decision-making of Islamic banks allocating funds to the public under conditions of economic crisis is influenced by inflation, deposits and net performing financing. The high inflationrate will increase the Islamic bank financing. The impact inflicted by the rising inflation is extra fund for financial needs that must be spent by the Islamic bank due to customers requiring additional funding to support their business operations. Other indicators, the more public funds are collected, hence can be used in distributing the Islamic bank financing. The other indicator is, when more people are taking bad loans during the crisis. The Islamic bank constantly doing the distribution of funding. Those effects occurred because in overcoming the risk of bad loans, the Islamic bank undertakes diversification and supervision toward the disbursed financing. With such undertaking will make the Islamic bank become more selective in determining the financing on public.

Keywords: *Macroeconomics, Economy Crysis, Financial Performance, Financing*

Abstrak

Dalam menjalankan intermediasi bank syariah memerlukan indikator internal maupun eksternal dalam melancarkan kegiatan pembiayaan. Dalam penelitian ini, indikator yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam pembiayaan kepada masyarakat adalah kondisi perekonomian sebagai faktor eksternal, dalam hal ini peneliti mengamati pada saat kondisi krisis ekonomi tahun 2008 sebagai tahun acuan. Indikator kedua adalah faktor fundamental berupa kinerja keuangan yang merupakan faktor pengendalian kinerja bank syariah terhadap pembiayaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal dan internal bank syariah dalam keputusan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam kondisi krisis ekonomi dipengaruhi oleh faktor inflasi, dana pihak ketiga dan net performing financing. Inflasi yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan bank syariah. Akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya inflasi adalah adanya tambahan dana pembiayaan yang harus dikeluarkan bank syariah dikarenakan nasabah pembiayaan membutuhkan tambahan biaya untuk menunjang kegiatan usahanya. Indikator lainnya, semakin banyak dana masyarakat yang terkumpul maka dapat digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Indikator lainnya, ketika kredit macet mengalami kenaikan saat krisis maka bank syariah tetap melakukan penyaluran pembiayaan. Pengaruh tersebut terjadi karena bank syariah dalam mengatasi peningkatan risiko kredit macet melakukan diversifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan, Dengan adanya upaya tersebut akan membuat bank syariah lebih selektif dalam memutuskan pembiayaan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi Makro, Krisis Ekonomi, Kinerja Keuangan, Pembiayaan.*

A. Pendahuluan

Isu penelitian ini bermula dari eksistensi perbankan syariah di Indonesia yang selama ini mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah dapat dikatakan memiliki peranan yang strategis dalam memperbaiki perekonomian nasional.

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang sangat strategis di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam memobilisasi dana dari masyarakat melalui kegiatan *funding* dan *financing*. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga

perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya (Sudarsono, 2004, hlm 56).

Volume usaha perbankan syariah hingga tahun 2011, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (*yoy*) telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp3,35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp130,5 triliun. *Marketshare* perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan penyaluran dana. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010 menjadi Rp 101,57 triliun pada Oktober 2011 atau meningkat 52,79%. Meskipun mengalami sedikit penurunan di awal tahun sebagai akibat dari *January effect*, namun penghimpunan dana dapat dipertahankan meningkat secara stabil pada triwulan III 2011. Laju pertumbuhan pada triwulan III 2011 yang sebesar 52,79% (*yoy*) tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010 sebesar 39,16%. Penghimpunan dana masyarakat terbesar adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun (61,06%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp27,81 triliun (27,38%) dan Giro sebesar Rp11,05 triliun (10,88%).

Sedangkan dari sisi penyaluran dana, piutang *murabahah* paling mendominasi tercatat sebesar Rp52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* yang sebesar Rp17,73 triliun (14,45%) dan piutang *qardh* sebesar Rp13,02 triliun (10,61%). Penyaluran dana berupa piutang *qardh* mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan *qardh* (gadai) emas (Bank Indonesia, 2012, hlm. 1-3).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat, ini terbukti dari tujuh tahun terakhir jumlah angka pembiayaan terus meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah *murabahah* yakni mencapai sekitar 46,161 miliar hingga Juni 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan *musyarakah* yakni mencapai sekitar 16,295 miliar hingga Juni 2012 (Bank Indonesia, 2012, hlm. 12).

Berdasarkan hal tersebut secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2011, hlm. 30).

Salah satu unsur yang terpenting dalam perkembangan suatu lembaga keuangan adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang optimal, karena hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi bank syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk memperoleh pendapatan, yaitu melalui kegiatan mengalokasikan dananya baik dalam bentuk memberikan pembiayaan kepada nasabah atau penggunaan dana pada sektor tertentu dalam menambah aset bank syariah.

Pembiayaan bank syariah pada Juni 2012 berdasarkan jenis penggunaan lebih besar berada pada sektor konsumsi, yakni sebesar 50,271 miliar diikuti modal kerja sebesar 46,603 miliar dan sektor investasi sebesar 20,719 miliar. Sedangkan pembiayaan bank syariah berdasarkan sektor ekonomi lebih besar berada pada sektor jasa dunia usaha 29,830 miliar diikuti sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 10,873 miliar, konstruksi 5,972 miliar, jasa sosial/masyarakat 5,712 miliar, perindustrian 3,898 miliar, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 3,698 miliar, listrik, gas dan air 3,029 miliar, pertanian, kehutanan dan sarana pertanian 2,203 miliar dan pertambangan sebesar 1,835 miliar (Bank Indonesia, 2012, hlm. 20-22).

Ada dua aspek yang melekat dalam investasi pembiayaan pada bank syariah, yaitu keuntungan (*return*) yang diharapkan dan risiko pembiayaan. Dalam konsep *return* dan risiko, bank syariah tidak boleh hanya memperhatikan besarnya *return* suatu aset, tetapi juga harus melihat

seberapa besar risiko yang harus ditanggung. Untuk meminimalkan risiko investasi pembiayaan, bank syariah harus mampu memperluas dananya pada berbagai pilihan aset dengan membentuk portofolio yang terdiri dari banyak aset. *Return* dan risiko secara teoritis mempunyai hubungan yang positif. Semakin tinggi risiko akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, begitu juga sebaliknya.

Dari aspek tersebut bank syariah pada sektor internal memerlukan indikator penting dalam melancarkan kegiatan penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukurannya adalah berupa kinerja keuangan bank syariah, baik itu dari jumlah penghimpunan, kecukupan modal, pendapatan pembiayaan, dan tingkat kredit bermasalah. Sehingga dari pada itu bank syariah dapat dengan mudah mengetahui kondisi pertumbuhan dan penurunan perusahaan terhadap keputusan yang diambil dalam penyaluran pembiayaan.

Fenomena yang terjadi adalah bank syariah memiliki sebuah kendala dalam menentukan penyaluran pembiayaan, diantaranya kondisi ekonomi yang tidak menentu, bank syariah menilai penyaluran dana tidak terlepas dari fenomena ekonomi sebuah negara. Kedua adalah sektor yang dibiayai belum memiliki banyak pilihan, artinya lebih banyak terfokus pada sektor mikro dan belum terfokus pada sektor yang besar seperti pertambangan atau kehutanan. Kendala tersebut dikarenakan jumlah dana yang tersedia pada perbankan syariah masih kecil, sehingga belum tentu bank syariah pada proyek pembiayaan skala besar yang memiliki tingkat *return* atau bagi hasil yang tinggi mampu untuk dibiayai secara besar.

Kondisi ekonomi makro secara umum memiliki hubungan dengan tingkat *return* dan risiko pembiayaan, terutama dampak inflasi dan pergerakan kurs mata uang. Faktor ekonomi makro tersebut merupakan faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Dalam analisis fundamental, kondisi variabel ekonomi makro mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan investasi yang diambil oleh bank syariah karena memiliki dampak terhadap sektor yang dibiayai. Ketika tingkat inflasi meningkat maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian, sedangkan ketika pergerakan kurs mata uang meningkat dalam artian mengalami pergerakan yang normal maka akan memiliki dampak yang positif bagi perekonomian.

Saat terjadi gejolak pada kondisi moneter di mana indikator ekonomi makro menunjukkan *trend* penurunan atau perlambatan, maka sektor

ekonomi akan mengalami penurunan yang juga akan berpengaruh pada besarnya penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan keadaan perekonomian yang diharapkan membaik merupakan sentimen positif yang berdampak pada besarnya jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Kinerja bank syariah dengan kondisi ekonomi makro pada dasarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan, terutama pada aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Tingkat *return* yang diperoleh bank syariah dari investasi pembiayaan tidak terlepas dari faktor eksternal salah satunya yaitu kondisi ekonomi makro yang dihadapi seperti inflasi dan kurs mata uang. Proses meningkatnya harga-harga secara umum dan menurunnya nilai uang terus-menerus akan mempengaruhi jumlah penawaran pembiayaan pada bank syariah, walaupun dalam analisis fundamental perusahaan atau investor menggunakan informasi mengenai kinerja perusahaan atau laporan keuangan sebagai indikator mengestimasi tingkat *return* dan risiko dari investasi yang dijalankan. Jadi setiap perubahan ekonomi yang terjadi baik itu mengalami pertumbuhan atau penurunan sangat memiliki dampak terhadap kinerja bank syariah dalam menghasilkan *return* dan ketidakpastian risiko yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin menguji pengaruh kondisi ekonomi dan kinerja keuangan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini variabel ekonomi terdiri dari inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar, sedangkan faktor kinerja diproksikan dengan rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Performing Financing* (NPF) dan Pendapatan Penyaluran Dana.

B. Kerangka Teori

1) Kurs terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pergerakan fluktuatif yang terjadi pada nilai tukar merupakan risiko yang sangat serius bagi para investor, perusahaan, pelaku bisnis dalam transaksi internasional. Dari sisi investor atau nasabah, ketidakstabilan kurs mata uang akan mempengaruhi biaya-biaya operasi. Apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar maka mengakibatkan biaya produksi yang akan semakin meningkat dikarenakan impor bahan baku dan peralatan. Para pelaku bisnis akan membayar kewajiban lebih tinggi dikarenakan nilai tukar mata uang domestik yang melemah, sehingga berpengaruh pada pendapatan

usaha. Lebih lanjut, melemahnya nilai tukar mata uang juga mempunyai pengaruh langsung berupa kenaikan harga barang ekspor maupun impor suatu negara. Apabila negara tersebut menganut sistem perekonomian terbuka maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga barang yang lain. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada biaya produksi usaha, sehingga berakibat pada menurunnya volume penjualan. Oleh karena itu, tidak heran bila setelah melemahnya nilai tukar mata uang sering terdengar keluhan-keluhan dalam dunia usaha (Boediono, 2005, hlm. 130). Keadaan sebaliknya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan yang disebabkan meningkatnya volume penjualan. Peningkatan tersebut akan menaikkan kinerja dunia usaha sehingga melancarkan investor dalam berinvestasi.

Pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha merupakan suatu hal yang penting dalam peningkatan investasi maupun kegiatan yang berorientasi pada ekspor. Keadaan tersebut pada gilirannya akan mendorong meningkatnya permintaan kredit untuk usaha produktif sehingga dapat mendorong perkembangan perbankan yang sehat. Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usaha terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau menjual barang ke pasar ekspor. Oleh karena itu, pengelolaan nilai mata uang yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro (Pohan, 2008, hlm. 55).

2) Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan

Para nasabah pembiayaan akan menangkap sinyal negatif atas meningkatnya inflasi, pada saat inflasi tinggi investor lebih memilih investasi dalam bentuk tabungan atau deposito karena lebih menguntungkan dan lebih pasti. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi akan meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga konsumsi akan menurun. Selain itu kenaikan harga faktor produksi juga akan meningkatkan biaya modal usaha. Jadi dalam hal ini bank syariah harus mengeluarkan dana pembiayaan lebih besar akibat dari meningkatnya inflasi.

Bank syariah tentunya melakukan penyaluran dana dengan hati-hati karena dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang relatif tinggi akan mengandung banyak risiko terjadinya gagal bayar dikemudian hari apabila inflasi semakin tidak terkendali.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam penerahan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2005, hlm. 52).

3) Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Pembiayaan

DPK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Alasan DPK dijadikan sebagai sumber dana untuk pembiayaan karena nasabah nantinya memiliki hak atas hasil pengelolaan dana tersebut, sehingga bank syariah punya kewajiban untuk memberikan berupa imbal hasil dari penggunaan dana tersebut.

Tingkat likuiditas yang tinggi atau rasio FDR yang rendah akan mengakibatkan pendapatan bank syariah menurun. Hal ini disebabkan terlalu banyaknya dana pihak ketiga yang menganggur. Apabila dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan akan menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan baik. Berjalannya fungsi ini akan meningkatkan pendapatannya dari pembiayaan yang disalurkan sehingga tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga akan naik.

4) Return on Asset terhadap Penyaluran Pembiayaan

Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Sartono, 2001, hlm. 123). Dalam perhitungannya ROA hanya menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva perusahaan. Semakin besar ROA maka dianggap sebagai informasi yang positif bagi investor dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik karena tingkat pengembalian investasi perbankan dari penyaluran dana

pembiayaan semakin besar dan risiko pembiayaan yang dialami semakin kecil. Dengan banyaknya pendapatan yang diterima oleh bank syariah, maka akan semakin banyak dana yang akan terkumpul untuk dapat dimanfaatkan untuk investasi berikutnya. Jika nilai ROA suatu bank semakin besar, maka semakin baik pula bank tersebut dalam menunjang pertumbuhan bisnisnya dan berarti bank syariah tersebut mempunyai cukup dana untuk ekspansi pembiayaan.

5) *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Ketika bank syariah memiliki cukup modal maka semakin tinggi CAR semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Disisi lain bank dinilai masih dalam batas aman dalam operasinya. Keadaan permodalan yang memadai ini akan menjaga kepercayaan masyarakat untuk tetap menyimpan dananya di bank. Sebaliknya, CAR yang kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank tersebut.

Semakin besar modal bank yang dapat dihimpun maka semakin besar kesempatan bank tersebut untuk melakukan ekspansi aktivitya yang perlu didukung oleh pembiayaan (*financing*). Perlu diperhatikan bahwa modal yang besar tanpa diimbangi ATMR-nya akan mengakibatkan bank tersebut *over likuid* atau dengan kata lain semakin besar dana yang menganggur (*idle fund*), hal ini tentu akan menurunkan performa dari bank yang bersangkutan. ATMR yang rendah menunjukkan bahwa aktiva bank tersebut mempunyai risiko yang relatif rendah atau dengan kata lain banyak aktivitya yang ditanamkan pada instrumen investasi yang berisiko kecil sehingga tidak berpengaruh baik terhadap profitabilitas bank tersebut.

6) *Net Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi yang merugikan dan harus diatasi secara serius. Ketika bank syariah mengeksekusi pembiayaan bermasalahnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup besar (Arifin, 2005, hlm. 210).

Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Bila ini terus menerus terjadi maka PPAP akan

menurunkan nilai profitabilitas bank. Oleh karena itu bank menginginkan tingkat NPF yang rendah. Nilai NPF yang rendah akan membuat bank syariah mempunyai cukup laba ditahan untuk digunakan mendanai kegiatan operasionalnya dan memperbesar pendapatannya melalui ekspansi usaha. Salah satu implikasi lain bagi pihak bank syariah sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank (Dendawijaya, 2005, hlm. 82-83). Otomatis hal ini akan mengurangi porsi pendapatan yang distibusikan kepada deposan di bank syariah.

7) Pendapatan Penyaluran Dana terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pendapatan penyaluran dana pada bank syariah merupakan pendapatan yang diperoleh atas keuntungan pengalokasian dana kepada masyarakat (nasabah). Pendapatan dana dari penyaluran pembiayaan jika dilihat dari laporan keuangan bank syariah terdiri dari *margin murabahah*, pendapatan bersih *salam* paralel, pendapatan bersih *istishna* paralel, sewa *ijarah*, bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu pendapatan dana bank syariah bisa juga berasal dari Bank Indonesia berupa Sertifikan Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan pendapatan dari bank-bank lainnya. Kemudian pendapatan lainnya dapat diperoleh dari jasa layanan, jasa investasi terikat (*mudharabah muqayadah*), pendapatan dari transaksi valuta asing.

Pihak bank syariah tentunya sudah dapat memproyeksikan seberapa besar keuntungan dan kerugian dari penawaran pembiayaan yang dilakukan. Jika pendapatan pembiayaan yang diproyeksikan itu besar maka akan meningkatkan jumlah penyaluran yang diberikan dalam bentuk pembiayaan. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha peminjam memberikan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar. Sebaliknya jika keuntungan usahanya kecil maka pendapatan pun kecil, atau bahkan merugi, maka pihak peminjam pun harus ikut menanggung kerugian tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis terapan. Penelitian jenis ini berusaha untuk menerapkan semua teori yang ilmiah atas keadaan pada saat itu. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti,

sehingga data seperti ini memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik (Hadi, 2006, hlm. 26).

Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mega Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan per triwulanan dari Maret 2008 hingga September 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009, hlm. 122). Pemilihan sampel dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian ini.

Teknik analisis data penelitian menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) (Ghozali, 2006, hlm. 86). Formulasi yang digunakan sebagai berikut:

$$FDR = a + b_1 \text{ Kurs} + b_2 \text{ Inf} + b_3 \text{ DPK} + b_4 \text{ ROA} + b_5 \text{ CAR} - b_6 \text{ NPF} + b_7 \text{ PPD} + e$$

Keterangan:

FDR	=	<i>Financing Deposit Ratio</i>	ROA	=	<i>Return on Asset</i>
a	=	Konstanta	CAR	=	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
b ₁ -b ₇	=	Koefisien Variabel Independen	NPF	=	<i>Net Performing Financing</i>
Kurs	=	Kurs Rupiah terhadap Dolar	PPD	=	Pendapatan Penyaluran Dana
Inf	=	Inflasi	e	=	Residu
DPK	=	Dana Pihak Ketiga			

D. Hasil dan Analisis

Variabel	Prediksi	Koefisien	t _{hitung}	Sig.	Kesimpulan	Ha
(Constant)		16,014	0,183	0,856		
Ln Kurs	+	2,803	0,305	0,761	Tidak Signifikan	Ditolak
Inflasi	+	0,727	2,675	0,010	Signifikan	Diterima

Ln DPK	+	4,493	3,247	0,002	Signifikan	Diterima
ROA	+	1,600	1,604	0,115	Tidak Signifikan	Ditolak
CAR	+	-0,665	-1,377	0,175	Tidak Signifikan	Ditolak
NPF	-	2,637	4,504	0,000	Signifikan	Ditolak
Ln PPD	+	-2,179	-1,480	0,145	Tidak Signifikan	Ditolak

a. *Dependent Variable*: FDR

Sumber: Data diolah

1) Pengaruh Kurs terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pada dasarnya pihak perbankan menilai apabila pembiayaan tersebut disalurkan dalam kondisi ketidakstabilan kurs mata uang, maka pihak yang dibiayai (nasabah) dalam menjalankan usahanya akan dipengaruhi biaya-biaya operasi. Semakin tinggi nilai kurs domestik dalam artian mengalami penguatan maka semakin baik bagi dunia usaha, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan yang disebabkan meningkatnya volume penjualan, sehingga sektor perbankan syariah bisa mengambil kebijakan penyaluran pembiayaan guna melancarkan investor dalam berinvestasi. Jika kurs mata uang domestik terjadi pelemahan maka akan mengakibatkan tambahan biaya-biaya pada dunia usaha terutama pada komoditas ekspor dan impor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas investasi, hal tersebut mendorong investor membutuhkan dana kepada bank syariah menjadi lebih besar sehingga mengakibatkan penyaluran pembiayaan bank syariah meningkat dan cenderung hati-hati dalam penyaluran dana terutama pada pembiayaan investasi dan modal kerja (produktif).

Hasil penelitian ini menjawab sebaliknya, jika tingkat kurs rupiah mengalami penguatan nilai maupun terjadi pelemahan nilai terhadap mata uang dolar maka hal tersebut tidak memberikan efek yang berarti terhadap keputusan penyaluran pembiayaan bank syariah. Hal ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Sujatna yang menyimpulkan bahwa kurs mata uang mempengaruhi penyaluran pembiayaan terutama pada pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* dan *murdharabah*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Syahrul, menjelaskan bahwa tingkat kurs memiliki pengaruh signifikan, artinya terdapat perbedaan pengaruh antara sebelum dan sesudah penggunaan SBIS. Sebelum digunakannya SBIS, kurs memiliki pengaruh negatif pada pembiayaan, namun sesudah penggunaan SBIS pengaruhnya menjadi positif.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan pembiayaan bank syariah pada Juni 2012 berdasarkan jenis penggunaan masih didominasi oleh sektor konsumsi, yakni sebesar 50,271 miliar diikuti modal kerja sebesar 46,603 miliar dan sektor investasi sebesar 20,719 miliar. Sedangkan pembiayaan bank syariah berdasarkan sektor ekonomi lebih besar berada pada sektor jasa dunia usaha, yakni sebesar 29,830 miliar (Bank Indonesia, 2012, hlm. 20-22). Berdasarkan data tersebut kita bisa menilai bahwa ekspansi pembiayaan bank syariah dinilai belum terlalu besar dalam skala internasional. Artinya sektor yang dibiayai bank syariah masih terbatas pada sektor mikro terutama pada pasar domestik sehingga kita menilai tingkat pergerakan kurs tidak berpengaruh terhadap ekspansi pembiayaan yang dilakukan.

Meskipun pergerakan kurs mata uang mengalami pelemahan pada Desember 2008 hingga Juni 2009, perbankan syariah cenderung melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ekspansi atau penyaluran dana kepada masyarakat, dengan memilih produk pembiayaan yang berisiko kecil seperti pembiayaan *murabahah*. Jika pembiayaan bank syariah sudah masuk pada ekspansi yang lebih besar seperti ekspor dan impor terutama pada pembiayaan produktif/bagi hasil, dalam arti tidak terpusat pada pembiayaan sektor konsumsi dalam negeri, bisa dipastikan perubahan kurs dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.

2) Pengaruh Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan

Ketika tingkat laju inflasi mengalami kenaikan maka perbankan syariah tetap menyalurkan pembiayaan meskipun pada saat inflasi sedang mengalami kenaikan. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dian Kurnianingrum yang menjelaskan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang positif, sehingga kenaikan tingkat inflasi menyebabkan kenaikan penyaluran kredit modal kerja. Hasil penelitian ini menolak yang dilakukan Syahrul yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah pada periode sebelum digunakannya SBIS dan sesudah digunakannya SBIS. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Dwi Retno Widiyanti, menjelaskan tingkat inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah nominal penawaran pembiayaan *istishna*. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap inflasi maka akan diikuti dengan penurunan pada penawaran pembiayaan.

Perbedaan hasil tersebut dikarenakan perubahan inflasi yang terjadi tersebut sudah diantisipasi sebelumnya. Pada dasarnya kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga konsumsi masyarakat akan menurun. Sebenarnya inflasi tidak selalu buruk, asalkan masih berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah bila laju inflasinya tinggi. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menjadi menurun, lebih-lebih pada saat terjadi inflasi yang tidak terkendali.

Selain dengan adanya upaya pengendalian atau antisipasi terhadap pergerakan inflasi, akibat lain yang ditimbulkan dari meningkatnya inflasi terutama dalam dunia usaha adalah akan menyebabkan kenaikan harga yang tinggi, sehingga menyebabkan nasabah pembiayaan (produktif) mengalami ketidakpastian dalam berusaha. Akibat hal tersebut nasabah membutuhkan tambahan biaya-biaya kepada perbankan syariah untuk menunjang kegiatan usahanya. Upaya yang dilakukan perbankan syariah adalah mengeluarkan dana yang lebih besar atas pembiayaan tersebut, sehingga perbankan syariah perlu melakukan kembali pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit yang tepat agar keadaan keuangan bank syariah tetap terjaga. Dalam hal ini bank syariah harus mengeluarkan pembiayaan dengan hati-hati karena jumlah penyaluran pembiayaan cenderung relatif tinggi dan mengandung banyak risiko terjadinya gagal bayar dikemudian hari apabila inflasi semakin tidak terkendali.

3) Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Pembiayaan

DPK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Alasan DPK dijadikan sebagai sumber dana untuk pembiayaan karena nasabah nantinya memiliki hak atas hasil pengelolaan dana tersebut, sehingga bank syariah punya kewajiban untuk memberikan berupa imbal hasil dari penggunaan dana tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priatin, kemudian penelitian Maryanah tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), kemudian penelitian Duddy dan Ghafur terhadap total pembiayaan bank syariah, kemudian ini juga didukung oleh Desi Arisandi yang meneliti pada bank umum di Indonesia. Hasil penelitian secara keseluruhan menjelaskan semakin besar

jumlah dana simpanan (DPK) yang dimiliki atau yang terkumpulkan oleh bank akan menyebabkan bank dapat menyalurkan pembiayaan.

4) Pengaruh *Return on Asset* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Pada dasarnya ROA menggambarkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA maka dianggap sebagai informasi yang positif bagi kinerja bank karena tingkat pengembalian investasi perbankan dari penyaluran dana (pembiayaan) semakin baik. Berdasarkan pola hubungan tersebut dapat dipahami bahwa hasil dari penelitian ini menjelaskan tingkat ROA tidak mempengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah, tentu saja hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dijelaskan di awal. Hasil ini menolak penelitian dari Desi yang menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan bahwa banyaknya pendapatan yang diterima oleh bank syariah masih didominasi oleh produk pembiayaan yang memiliki risiko yang kecil seperti *murabahah* dibandingkan dengan produk bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, karena mayoritas ekspansi pembiayaan pada bank syariah dalam beberapa tahun terakhir menempatkan pembiayaan pada sektor konsumsi masih besar dibandingkan dengan modal kerja dan investasi. Selain itu pendapatan yang diperoleh bank syariah masih merupakan pendapatan yang bisa diprediksi di masa mendatang, pendapatan tersebut bisa diandalkan jika bank syariah melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih besar seperti memaksimalkan pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Maryanah menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan *profit*. Se jauh ini dapat dikatakan bank syariah masih mengandalkan jumlah DPK yang terkumpul untuk ekspansi pembiayaan, semakin banyak dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk investasi berikutnya.

Walaupun dalam penelitian ini mengindikasikan seberapa pun tingkat ROA yang dihasilkan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan bank syariah, tetapi rasio tersebut masih penting untuk dipertimbangkan. Jika nilai ROA suatu bank semakin besar, maka semakin baik pula bank tersebut dalam menunjang pertumbuhan bisnisnya dan berarti bank tersebut mempunyai cukup dana modal.

5) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Bank syariah yang memiliki rasio CAR yang tinggi menyebabkan semakin baik posisi modalnya. Modal yang baik akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan modal yang besar memungkinkan bank untuk menciptakan pembiayaan yang lebih besar pula, sehingga akan meningkatkan laba.

Berdasarkan pola hubungan tersebut dapat dipahami bahwa hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Pratin dan Akhyar yang menjelaskan bahwa tingkat CAR tidak mempengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah. Untuk memperoleh tingkat CAR yang baik (memenuhi peraturan BI) bank tidak hanya mengandalkan modal inti saja, bank syariah juga bisa mencari sumber dana lain seperti dana pihak ketiga, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi sebagai modal pelengkap.

Menurut Rose dan Kolari (1995), bank umum (komersial) adalah lembaga *leverage* tinggi (*highly leverage organizations*), tergantung terutama pada pinjaman (*debt*) atau simpanan (*deposit*) untuk meningkatkan aset-asetnya. Ekuitas hanya sebagai sandaran (perlindungan) kecil terhadap depositor/kreditor atas penurunan nilai aset bank, bank bergantung terutama pada kompetensi dan kehati-hatian (*competency and prudence*) manajemen dan stabilitas sistem keuangan bank. Selama modal inti (ekuitas) masih bisa memenuhi kewajiban minimum penyediaan modal maka suatu lembaga bank akan mengoptimalkan simpanan dana pihak ketiga untuk meningkatkan pembiayaan yang disalurkan (Pratin, 2005, hlm. 35).

6) Pengaruh *Net Performing Financing* terhadap Penyaluran Pembiayaan

Salah satu implikasi buruk bagi pihak bank syariah sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF yang tinggi) adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Pada dasarnya bank syariah dalam mengatasi peningkatan risiko NPF dengan melakukan diversifikasi pembiayaan yang disalurkan. Walaupun rasio NPF dalam situasi meningkat, dengan adanya upaya-upaya pengawasan terhadap ekspansi pembiayaan maka akan memudahkan bank

syariah dalam memutuskan penyaluran dana kepada masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratin yang menjelaskan tingkat NPF tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Penelitian ini juga menolak penelitian Dwi Retno dan Desi Arisandi yang menjelaskan bahwa tingkat NPF berpengaruh negatif terhadap jumlah nominal penawaran pembiayaan.

Berdasarkan data sampel yang diambil dalam penelitian ini secara keseluruhan tingkat rata-rata NPF bank syariah selama periode pengamatan sebesar 2,22%, tingkat kredit macet tertinggi ditempati oleh Bank Muamalat Indonesia dengan rata-rata berkisar 3,5%, nilai NPF tersebut sempat terpuruk sebesar 7.32% pada September 2009, dan 5.83% pada Januari 2010. Nilai NPF Bank Syariah Mandiri rata-rata sekitar 1,55%, sementara Bank Syariah Mega Indonesia 1,52%. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen pembiayaan bank umum syariah cukup baik dalam mengurangi efek buruk risiko kredit macet.

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank-bank syariah pada tahun pengamatan ini telah mampu meningkatkan kualitas kreditnya, baik pada produk pembiayaan *equity financing* (pembiayaan bagi hasil) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* maupun pada pembiayaan *debt financing* seperti *murabahah*, *salam*, *istishna* dan lainnya. Untuk kedepannya bank syariah dituntut untuk lebih berhati-hati saat menyalurkan pembiayaan, tujuan tersebut untuk mengurangi risiko kredit macet, seperti jumlah keuntungan atau kerugian dari pembiayaan. Kemudian bank syariah juga dituntut mampu lebih dalam melakukan studi kelayakan bisnis, mulai dari analisa awal, penilaian prospek usaha sampai pada pengawasan pembiayaan.

7) Pengaruh Pendapatan Penyaluran Dana terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dalam prinsip operasional bank syariah, keuntungan akan diberikan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati pada akad transaksi. Jika dalam pembiayaan bagi hasil, pendapatan yang diperoleh sangat tergantung kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam mengelola sumber dana (*shahibul mal*). Keuntungan ini tentu saja akan berfluktuasi tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dan kesepakatan *nisbah* di awal. Pada periode pengamatan, pendapatan penyaluran dana memang selalu fluktuatif. Hal ini didorong oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga memberikan efek negatif terutama bagi para pengusaha (*mudharib*) yang menyebabkan

iklim usaha melemah sehingga berimbas pada keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha tersebut. Pada akhirnya kondisi yang dialami oleh pengusaha tersebut berimbas pada rendahnya keuntungan yang diperoleh bank syariah.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bank syariah memiliki sebuah kendala dalam menentukan penyaluran pembiayaan, diantaranya adalah sektor yang dibiayai belum memiliki banyak pilihan, artinya lebih banyak terfokus pada sektor mikro, terutama pada sektor dunia usaha dan belum bisa sepenuhnya terfokus pada sektor yang besar seperti sektor perindustrian, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, listrik, gas dan air, pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, dan pertambangan.

Kendala yang terjadi saat ini adalah jumlah dana yang tersedia pada perbankan syariah yang masih kecil, pengendalian dana di bank syariah sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga, sehingga belum tentu bank syariah dapat mengandalkan dana-dana tersebut pada proyek pembiayaan berskala besar yang memiliki tingkat *return* atau bagi hasil yang tinggi. Jika bank syariah tetap melakukan pembiayaan tersebut maka bank syariah membutuhkan dana (liabilitas) lebih besar untuk ekspansi pembiayaan tersebut. Bank syariah juga perlu mempertimbangkan risiko-risiko proyek atas pembiayaan yang disalurkan, penyaluran dana tidak terlepas dari fenomena ekonomi sebuah negara, jika kondisi ekonomi tidak stabil maka menyulitkan bank syariah dalam mengelola dananya sehingga akan mengganggu tingkat rentabilitas bank syariah.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada masa krisis ekonomi tahun 2008 semakin banyak dana masyarakat yang terkumpul (DPK mengalami kenaikan) maka akan menyebabkan dana yang terkumpul tersebut dapat digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Kedua, ketika tingkat laju inflasi selama periode pengamatan mengalami kenaikan maka bank syariah tetap melakukan penyaluran pembiayaan. Pengaruh tersebut dikarenakan perubahan inflasi terutama yang terjadi pada masa krisis tersebut sudah diantisipasi sebelumnya. Sehingga bank syariah tetap menyalurkan pembiayaan meskipun pada saat inflasi sedang mengalami kenaikan. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya inflasi adalah adanya tambahan dana pembiayaan yang harus dikeluarkan bank syariah dikarenakan nasabah pembiayaan membutuhkan tambahan biaya-biaya untuk menunjang kegiatan usahanya.

Ketiga, ketika tingkat NPF mengalami kenaikan maka bank syariah tetap melakukan keputusan penyaluran pembiayaan. Pengaruh tersebut terjadi karena bank syariah dalam mengatasi peningkatan risiko kredit macet (NPF) dengan melakukan diversifikasi pembiayaan yang disalurkan. Walaupun rasio NPF dalam situasi meningkat, dengan adanya upaya-upaya pengawasan terhadap ekspansi pembiayaan maka akan memudahkan bank syariah dalam memutuskan penyaluran dana kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Bank Indonesia. 2010. *Outlok Perbankan Syariah Indonesia 2011*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2012. *Outlok Perbankan Syariah di Indonesia 2012*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2012. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2012*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Boediono. 2005. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Undip.
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pratin; dan Akhyar Adnan. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Bagi Hasil dan Keuntungan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*. Edisi Khusus on Finance: 35.

Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.